ARGOPURO

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

SUMPAH, KEKUASAAN, DAN KETAATAN: TELAAH DALAM SEGI POLITIK TERHADAP STRUKTUR PEMERINTAHAN TRADISIONAL JAWA DALAM NASKAH "*SERAT SUMPAHIPUN ABDI DALEM PATIH ING KARATON SURAKARTA*" 1847

Aulia Bagas Satriya[1], Ahmad Baihaqi[2]
[12]Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultyas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email : 03020223024@uinsa.ac.id[1], 03020223016@uinsa.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji makna sumpah jabatan, hubungan loyalitas politik, dan nilai-nilai sosial dalam naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* tahun 1847. Naskah tersebut berkaitan dengan pengangkatan Raden Adipati Sasradiningrat sebagai patih pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono VII dan memperlihatkan keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam struktur pemerintahan Kasunanan Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan filologi, studi pustaka, dan pendekatan historis. Analisis dilakukan dengan membaca dan mengalihbahasakan isi naskah, kemudian menafsirkannya berdasarkan konteks sosial dan politik Jawa pada abad ke-19. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumpah jabatan dalam naskah tidak hanya memiliki makna moral sebagai bentuk komitmen seorang pejabat, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan pengaturan loyalitas dalam struktur pemerintahan. Kedudukan patih memperlihatkan hubungan yang kompleks antara otoritas tradisional keraton dan kepentingan administrasi kolonial. Selain itu, naskah memuat nilai-nilai sosial berupa tanggung jawab terhadap rakyat kecil, keadilan, kejujuran, religiusitas, dan pengendalian diri. Penelitian ini menegaskan bahwa naskah tersebut dapat digunakan untuk memahami dimensi moral dan politik kepemimpinan tradisional Jawa pada masa kolonial, meskipun penafsiran mengenai praktik kekuasaan historis tetap memerlukan dukungan sumber pembanding.

Kata kunci: sumpah jabatan, Patih Sasradiningrat, Kasunanan Surakarta, kekuasaan politik, nilai sosial

Abstract

This study examines the meaning of the oath of office, political loyalty, and social values in the 1847 manuscript Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta. The manuscript relates to the appointment of Raden Adipati Sasradiningrat as patih during the reign of Susuhunan Pakubuwono VII and reflects the involvement of the Dutch colonial government in the administrative structure of the Surakarta Sunanate. This study employs a qualitative

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026
Plagirism Checker: No 235.223.443

Copyright : Author
Publish by : Argopuro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

method combining a philological approach, literature review, and historical analysis. The analysis involves reading and translating the manuscript before interpreting its contents within the social and political context of nineteenth-century Java. The findings indicate that the oath of office carries not only a moral meaning as a commitment made by a government official but also a political function associated with the legitimacy of authority and the regulation of loyalty within the governing structure. The position of the patih reveals a complex relationship between the traditional authority of the royal court and the administrative interests of the Dutch colonial government. The manuscript also conveys social values, including responsibility toward ordinary people, justice, honesty, religiosity, and self-restraint. This study highlights the manuscript's significance for understanding the moral and political dimensions of traditional Javanese leadership during the colonial period. Nevertheless, interpretations of historical power relations require further examination through comparison with other historical sources.

***Keywords**: oath of office, Patih Sasradiningrat, Surakarta Sunanate, political power, social values*

Pendahuluan

Pendahuluan: Manuskrip atau naskah kuno merupakan sumber sejarah yang penting untuk memahami perkembangan kehidupan politik, sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat pada masa lampau. Sebagai produk intelektual yang diwariskan dari generasi ke generasi, manuskrip tidak hanya memuat informasi mengenai peristiwa sejarah, tetapi juga merekam nilai, norma, serta struktur kekuasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam kajian sejarah Indonesia, naskah kuno memiliki kedudukan penting karena dapat digunakan untuk menelusuri dinamika pemerintahan, hubungan antarkelompok sosial, dan perubahan sistem kekuasaan. Kajian terhadap naskah juga memungkinkan peneliti memahami bagaimana suatu masyarakat membentuk dan mempertahankan legitimasi politiknya melalui tradisi, simbol, dan nilai budaya yang berlaku (Ricklefs, 2008; Widodo, 2022).

Salah satu konteks sejarah yang menarik untuk dikaji melalui manuskrip adalah struktur pemerintahan tradisional Jawa pada masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, pemerintahan kerajaan Jawa menghadapi situasi politik yang kompleks karena keberadaan otoritas tradisional berdampingan dengan pengaruh pemerintah kolonial. Kasunanan Surakarta menjadi salah satu contoh pemerintahan yang memperlihatkan hubungan antara kekuasaan raja, pejabat birokrasi keraton, dan administrasi kolonial. Dalam kondisi tersebut, jabatan-jabatan tradisional tidak hanya berfungsi untuk menjalankan pemerintahan kerajaan, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan politik yang lebih luas antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan institusi tradisional perlu dipahami dengan mempertimbangkan perubahan struktur kekuasaan dan kepentingan politik pada masa itu (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

Persoalan tersebut dapat ditelusuri melalui naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta*, yang memuat pidato pengangkatan Raden Adipati Sasradiningrat sebagai patih Kasunanan Surakarta pada 11 Februari 1847. Pengangkatan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono VII dan melibatkan Residen Belanda Johan

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

Frederik Walrave Phannes. Keterlibatan penguasa keraton dan pejabat kolonial dalam prosesi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kewenangan tradisional dan administrasi kolonial. Oleh karena itu, naskah ini tidak hanya dapat dibaca sebagai dokumen pengangkatan pejabat, tetapi juga sebagai sumber untuk mengkaji bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan ketaatan politik dirumuskan dalam struktur pemerintahan Kasunanan Surakarta (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

Permasalahan utama yang muncul dari naskah tersebut adalah kedudukan patih sebagai pejabat yang berada dalam hubungan kekuasaan dengan dua otoritas, yaitu Susuhunan sebagai penguasa tradisional dan pemerintah kolonial yang diwakili oleh residen. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai arah loyalitas politik seorang patih, terutama ketika kewajiban terhadap keraton berhadapan dengan kepentingan administrasi kolonial. Di satu sisi, patih harus menjaga kehormatan keraton dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Di sisi lain, keberadaan pejabat kolonial dalam proses pengangkatannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan kekuasaan lokal juga berkaitan dengan kepentingan Belanda. Kajian mengenai birokrasi tradisional Kasunanan Surakarta menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara pejabat keraton dan struktur pemerintahan kolonial dalam menjelaskan perubahan kedudukan birokrasi Jawa pada masa tersebut (Anggie et al., 2019; Nawawi, 2023).

Selain persoalan loyalitas, naskah tersebut memuat persoalan mengenai penggunaan nilai moral dan budaya sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan. Pesan mengenai keadilan, tanggung jawab terhadap rakyat kecil, pengendalian diri, dan kewajiban bawahan untuk menaati atasan memperlihatkan bahwa jabatan pemerintahan dipahami melalui dimensi politik sekaligus etika sosial. Dalam tradisi Jawa, kepemimpinan berkaitan dengan tuntutan moral, keteraturan hubungan sosial, dan kewajiban menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami melalui kajian mengenai etika Jawa dan sistem nilai tradisional yang menempatkan tanggung jawab, kejujuran, serta kepatuhan sebagai bagian dari kehidupan sosial (Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005). Namun, nilai moral dalam suatu teks pemerintahan juga perlu dibaca secara kritis karena dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus sarana untuk memperkuat otoritas pemimpin.

Meskipun kajian mengenai birokrasi tradisional, kekuasaan kolonial, dan etika Jawa telah memberikan landasan untuk memahami pemerintahan Kasunanan Surakarta, pembacaan terhadap naskah pengangkatan patih secara khusus tetap penting dilakukan. Kajian birokrasi membantu menjelaskan hubungan struktural antara pejabat keraton dan pemerintah kolonial, sedangkan kajian etika Jawa memberikan konteks untuk memahami nilai-nilai moral yang dilekatkan pada kepemimpinan (Anggie et al., 2019; Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005). Persoalan yang perlu diperjelas adalah bagaimana unsur sumpah, loyalitas, dan tanggung jawab sosial muncul secara bersamaan dalam satu naskah pengangkatan pejabat. Dengan demikian, celah pembahasan dalam penelitian ini terletak pada perlunya pembacaan yang menghubungkan isi naskah dengan relasi kekuasaan dan nilai sosial yang tercermin di dalamnya, tanpa memisahkan dimensi politik dari dimensi moral.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* melalui keterkaitan tiga aspek, yaitu makna sumpah jabatan, loyalitas politik antara patih, Susuhunan, dan pemerintah kolonial, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam teks. Penelitian ini tidak bertujuan membentuk teori baru mengenai kekuasaan tradisional Jawa, melainkan menyajikan pembacaan analitis terhadap naskah dengan menghubungkan isi teks, struktur pemerintahan, dan etika kepemimpinan. Melalui pendekatan tersebut, sumpah jabatan dipahami bukan semata-mata sebagai bagian dari prosesi pengangkatan pejabat, tetapi juga sebagai teks yang memperlihatkan hubungan antara legitimasi politik, tanggung jawab sosial, dan pengaturan ketaatan dalam pemerintahan tradisional (Widodo, 2022; Anggie et al., 2019).

Kajian ini penting dilakukan karena manuskrip dapat memberikan pemahaman mengenai cara kekuasaan dijalankan dan dilegitimasi dalam hubungan antara keraton dan pemerintah kolonial. Pemahaman tersebut juga membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai seperti

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan religiusitas ditempatkan dalam ideal kepemimpinan Jawa, sekaligus bagaimana ketaatan kepada atasan berkaitan dengan keteraturan birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada satu rumusan masalah: bagaimana naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* merepresentasikan makna sumpah jabatan, relasi loyalitas politik antara patih, Susuhunan, dan pemerintah kolonial Belanda, serta nilai-nilai sosial dalam struktur pemerintahan tradisional Jawa pada tahun 1847?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filologi dan historis yang didukung oleh studi pustaka. Pendekatan filologi digunakan untuk membaca dan memahami teks *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta*, khususnya bagian yang berkaitan dengan pengangkatan Raden Adipati Sasradiningrat sebagai patih, kewajiban pejabat, serta pesan moral yang disampaikan dalam naskah. Proses pembacaan dilakukan dengan memperhatikan isi teks dan makna ungkapan yang digunakan, kemudian mengalihbahasakan bagian berbahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dianalisis berdasarkan konteksnya. Pendekatan ini membantu menempatkan teks sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi informasi dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya, metode historis digunakan untuk memahami isi naskah dalam konteks sosial dan politik Kasunanan Surakarta pada abad ke-19. Analisis historis diarahkan pada hubungan antara Susuhunan Pakubuwono VII, Patih Raden Adipati Sasradiningrat, dan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh residen. Konteks tersebut digunakan untuk memahami kedudukan patih dalam struktur pemerintahan tradisional serta hubungan antara kewenangan keraton dan administrasi kolonial. Pembacaan ini didukung oleh literatur mengenai sejarah Indonesia dan birokrasi tradisional Kasunanan Surakarta agar isi naskah tidak ditafsirkan secara terpisah dari konteks zamannya (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan politik kolonial, birokrasi keraton, etika Jawa, dan nilai-nilai sosial dalam kepemimpinan tradisional. Literatur yang digunakan meliputi kajian mengenai birokrasi Kasunanan Surakarta, hubungan elite lokal dengan kolonialisme, serta pemikiran mengenai etika dan norma tradisional Jawa (Nawawi, 2023; Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005; Mulder, 2001). Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk membandingkan dan menjelaskan temuan dari pembacaan naskah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi bagian-bagian naskah yang berkaitan dengan sumpah atau janji jabatan, kewajiban patih, hubungan dengan pejabat lain, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Kedua, mengelompokkan temuan ke dalam tiga fokus pembahasan, yaitu makna sumpah jabatan, bentuk loyalitas dan ketaatan politik, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam teks. Ketiga, menafsirkan temuan tersebut dengan mempertimbangkan konteks pemerintahan Kasunanan Surakarta dan literatur pendukung. Melalui tahapan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan keterkaitan antara isi naskah, struktur kekuasaan, dan etika kepemimpinan tanpa mengabaikan batas informasi yang benar-benar tersedia dalam sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Naskah Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta dapat dipahami bukan hanya sebagai catatan mengenai pengucapan sumpah jabatan, tetapi juga sebagai sumber untuk melihat nilai, tanggung jawab, dan relasi kekuasaan dalam pemerintahan tradisional Jawa. Sumpah jabatan memuat harapan agar seorang patih mampu menjalankan kewajibannya dengan benar, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga kesetiaan kepada pihak yang memberinya amanah. Dengan demikian, isi naskah tersebut memiliki makna yang melampaui aspek seremonial karena berkaitan dengan etika kepemimpinan dan pelaksanaan kekuasaan.

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

Dalam konteks Karaton Surakarta pada abad ke-19, kedudukan patih menjadi penting karena ia berada di antara otoritas Susuhunan, kepentingan masyarakat, dan pengaruh pemerintah kolonial. Posisi tersebut menuntut patih untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mempertahankan nilai dan tata aturan keraton. Oleh karena itu, pembacaan terhadap naskah sumpah ini perlu memperhatikan dua aspek utama, yaitu makna moral yang terkandung dalam sumpah dan konteks politik yang melatarbelakangi pelaksanaan jabatan patih. Pendekatan tersebut memungkinkan naskah dipahami sebagai sumber sejarah yang merekam hubungan antara etika, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

1. Makna Sumpah Jabatan dalam Naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta*

Naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* menggambarkan proses pengangkatan Raden Adipati Sasradiningrat sebagai patih Kasunanan Surakarta pada tahun 1847. Meskipun istilah sumpah jabatan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu bentuk formal dalam teks yang dibahas, isi naskah memuat sejumlah kewajiban dan pesan moral yang dapat dipahami sebagai ikrar tanggung jawab seorang pejabat. Naskah tersebut menekankan kesetiaan, keadilan, tanggung jawab terhadap rakyat, dan kepatuhan terhadap struktur pemerintahan. Oleh karena itu, makna sumpah jabatan dalam penelitian ini dipahami berdasarkan isi dan pesan yang terkandung dalam teks, bukan semata-mata berdasarkan istilah yang digunakan.

Makna pertama adalah sumpah sebagai perjanjian moral dan politik. Pengangkatan Sasradiningrat berlangsung dalam konteks hubungan antara Susuhunan Pakubuwono VII dan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Residen Johan Frederik Walrave Phannes. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan patih tidak hanya berhubungan dengan kewenangan internal keraton, tetapi juga berkaitan dengan struktur administrasi kolonial. Sumpah atau ikrar tanggung jawab dalam konteks ini dapat dibaca sebagai penegasan kewajiban seorang pejabat untuk menjalankan tugasnya dalam struktur kekuasaan yang melibatkan otoritas tradisional dan kolonial. Hubungan antara birokrasi keraton dan pemerintah kolonial merupakan salah satu aspek penting dalam memahami perubahan pemerintahan tradisional Jawa pada abad ke-19 (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

Makna kedua adalah sumpah sebagai janji pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terlihat dalam penggalan teks berbahasa Jawa, "yèn pamurih pakênira marang kaslamêtaning wong cilik angluwihi marang awak pakênira dhewe", yang berarti mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil daripada kepentingan diri sendiri. Pesan tersebut menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin. Jabatan patih tidak hanya dipahami sebagai kedudukan yang memberikan kewenangan, tetapi juga sebagai amanah yang menuntut perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Penekanan pada kepentingan rakyat kecil memperlihatkan adanya ideal kepemimpinan yang mengharuskan pejabat mengendalikan kepentingan pribadi dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Pandangan tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai etika Jawa yang menempatkan tanggung jawab moral dan keteraturan sosial sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat (Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005).

Makna ketiga adalah dimensi spiritual dalam pelaksanaan jabatan. Dimensi ini tampak dalam penggalan teks, "*Mêmujia ing Gusti Allah Mahakawasa, muga-muga pakênira tinuduhna ing dêdalan kang bênê*r", yang berarti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu ditunjukkan ke jalan yang benar. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak hanya ditempatkan dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga dikaitkan dengan tanggung jawab religius. Seorang pejabat diharapkan mampu menjaga perilakunya, mempertimbangkan kebenaran, serta menghindari tindakan yang didorong oleh ambisi dan kepentingan pribadi. Dalam konteks nilai tradisional Jawa, dimensi spiritual dapat menjadi

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

landasan moral bagi perilaku seorang pemimpin dan cara ia menjalankan kewenangannya (Mulder, 2001; Magnis-Suseno, 1997).

Makna berikutnya berkaitan dengan sumpah sebagai instrumen pengawasan dan loyalitas. Pada bagian akhir naskah, para pejabat bawahan atau wedana ditekankan untuk menaati perintah patih dan tidak menyembunyikan informasi darinya. Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dan kepatuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Di satu sisi, aturan itu dapat mendukung koordinasi birokrasi agar pekerjaan pemerintahan berlangsung secara teratur. Di sisi lain, kewajiban untuk selalu patuh juga memperlihatkan bagaimana struktur pemerintahan mempertahankan kewenangan pejabat yang berada pada posisi lebih tinggi. Dalam kajian birokrasi tradisional, hubungan hierarkis antara pejabat menjadi bagian penting untuk memahami mekanisme pengawasan dan keberlangsungan pemerintahan (Anggie et al., 2019; Sarafuddin, 2016).

Dengan demikian, sumpah jabatan dalam naskah tersebut memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi politik, sosial, spiritual, dan administratif. Sumpah menegaskan tanggung jawab patih dalam menjalankan kewenangan, mengutamakan kepentingan masyarakat, menjaga perilaku moral, serta mengatur hubungan dengan pejabat bawahan. Namun, pesan moral tersebut juga perlu dibaca bersama konteks kekuasaan yang melatarbelakanginya. Nilai-nilai kepemimpinan yang ideal tidak berdiri terpisah dari struktur pemerintahan, melainkan menjadi bagian dari cara kewenangan dan ketaatan dirumuskan dalam kehidupan politik Kasunanan Surakarta (Widodo, 2022; Magnis-Suseno, 1997).

2. Bentuk Loyalitas dan Ketaatan Politik antara Patih, Susuhunan, dan Pemerintah Kolonial Belanda

Dalam struktur pemerintahan Kasunanan Surakarta pada abad ke-19, patih menempati posisi penting sebagai pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan dan menghubungkan berbagai unsur birokrasi. Naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* memperlihatkan bahwa kedudukan tersebut berkaitan dengan hubungan antara Susuhunan Pakubuwono VII, Patih Raden Adipati Sasradiningrat, dan pemerintah kolonial Belanda. Relasi ini menunjukkan bahwa pemerintahan tradisional tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara raja dan bawahannya, sebab keberadaan administrasi kolonial turut memengaruhi pelaksanaan kewenangan. Kajian mengenai birokrasi Kasunanan Surakarta menempatkan hubungan antara pejabat tradisional dan pemerintah kolonial sebagai bagian penting dalam memahami perubahan struktur pemerintahan pada masa tersebut (Anggie et al., 2019; Nawawi, 2023).

Loyalitas patih terhadap Susuhunan merupakan bagian dari kewajiban yang melekat pada kedudukannya di dalam pemerintahan keraton. Susuhunan menjadi sumber otoritas tradisional dan simbol keberlanjutan tatanan politik kerajaan. Kesetiaan kepada raja berkaitan dengan kewajiban menjaga keteraturan pemerintahan, menjalankan tugas, dan mempertahankan kehormatan keraton. Dalam tradisi kekuasaan Jawa, kewibawaan pemimpin juga berhubungan dengan nilai budaya dan pandangan moral yang mengatur perilaku pejabat maupun masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan antara patih dan Susuhunan tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga berakar pada tradisi dan norma sosial yang membentuk legitimasi kekuasaan (Magnis-Suseno, 1997; Mulder, 2001). Namun, kedudukan patih dalam konteks kolonial juga memperlihatkan hubungan dengan pemerintah Belanda melalui pejabat residen. Keterlibatan Residen Johan Frederik Walrave Phannes dalam prosesi pengangkatan Sasradiningrat menunjukkan bahwa jabatan tersebut berada dalam ruang politik yang turut dipengaruhi oleh kepentingan kolonial. Dalam situasi demikian, patih harus menjalankan tugas pemerintahan dalam struktur yang mempertemukan kewenangan keraton dan kepentingan administrasi Belanda. Keberadaan dua otoritas ini memperlihatkan adanya hubungan kekuasaan yang kompleks, meskipun isi naskah saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh keputusan pemerintahan secara langsung dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Untuk memahami hubungan tersebut secara lebih luas, konteks sejarah dan kajian mengenai birokrasi Kasunanan perlu digunakan sebagai sumber pendukung (Ricklefs, 2008; Anggie et al., 2019).

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

Hubungan antara patih dan pejabat kolonial memperlihatkan bagaimana struktur pemerintahan tradisional dapat tetap dipertahankan sekaligus beroperasi dalam lingkungan politik kolonial. Institusi keraton tetap memiliki kedudukan simbolis dan kultural, sementara administrasi kolonial menjadi unsur yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, jabatan patih memiliki fungsi penghubung di antara berbagai kepentingan yang tidak selalu sepenuhnya sama. Kajian mengenai hubungan elite keraton dan kolonialisme menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan pada masa kolonial perlu dipahami melalui interaksi antara struktur pemerintahan lokal dan kepentingan politik Belanda, bukan hanya melalui penggantian satu sistem dengan sistem lainnya (Nawawi, 2023; Anggie et al., 2019).

Selain hubungan antara patih, Susuhunan, dan residen, naskah tersebut juga memperlihatkan pola ketaatan secara hierarkis melalui kewajiban para wedana untuk mematuhi perintah patih dan tidak menyembunyikan informasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa patih memiliki peran koordinatif terhadap pejabat yang berada di bawahnya. Keterbukaan informasi dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, sedangkan kewajiban untuk menaati perintah menegaskan kedudukan patih dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, hubungan antara pejabat tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan administratif, tetapi juga dengan pemeliharaan hierarki dan pengawasan dalam pemerintahan tradisional (Sarafuddin, 2016; Anggie et al., 2019).

Secara keseluruhan, naskah tersebut memperlihatkan bahwa loyalitas politik dalam pemerintahan Kasunanan Surakarta memiliki beberapa lapisan. Patih berkewajiban menjalankan tugas dalam struktur keraton, berhubungan dengan administrasi kolonial, dan mengoordinasikan pejabat bawahan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa ketaatan politik bukan semata-mata persoalan kesetiaan pribadi, melainkan juga bagian dari susunan birokrasi dan hubungan kekuasaan yang berlaku pada masa itu. Meskipun naskah memuat nilai-nilai ideal tentang kesetiaan dan tanggung jawab, penafsiran terhadap pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan konteks historis serta hubungan antara otoritas tradisional dan kolonial (Ricklefs, 2008; Widodo, 2022; Anggie et al., 2019).

3. Nilai-Nilai Sosial yang Terkandung dalam Naskah

Naskah *Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta* memuat sejumlah nilai sosial yang berkaitan dengan etika kepemimpinan dan tata pemerintahan tradisional Jawa. Nilai-nilai tersebut terlihat melalui pesan mengenai tanggung jawab seorang pejabat, perlindungan terhadap rakyat kecil, penegakan keadilan, keterbukaan informasi, religiusitas, dan kepatuhan dalam hubungan hierarkis. Nilai tersebut dapat dibaca sebagai gambaran mengenai perilaku yang diharapkan dari seorang pejabat dalam menjalankan kewenangannya. Dalam kajian etika Jawa, norma dan nilai sosial berperan sebagai pedoman yang membentuk hubungan antara individu, pemimpin, dan masyarakat (Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005).

Nilai pertama adalah tanggung jawab sosial seorang pemimpin terhadap rakyat. Penggalan naskah yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil memperlihatkan bahwa seorang patih diharapkan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri. Pesan tersebut menempatkan jabatan sebagai amanah yang mengandung kewajiban sosial. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memerintah, tetapi juga menuntut kesediaan pejabat untuk memperhatikan kondisi masyarakat dan menghindari tindakan yang merugikan mereka. Nilai ini memperlihatkan adanya ideal kepemimpinan yang menempatkan tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari legitimasi moral seorang pejabat (Magnis-Suseno, 1997; Pratikno, 2005).

Nilai kedua adalah keadilan dan penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang. Isi naskah menekankan pentingnya seorang pejabat menjalankan tugas secara benar serta menjaga keselamatan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, keadilan dapat dipahami sebagai tuntutan agar kewenangan tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pesan moral tersebut menunjukkan bahwa kedudukan seorang pejabat perlu disertai tanggung jawab untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

demikian, keadilan menjadi salah satu prinsip etis yang menghubungkan kewenangan politik dengan kewajiban melindungi kepentingan sosial (Pratikno, 2005; Magnis-Suseno, 1997).

Nilai ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan informasi. Ketentuan dalam naskah yang mengharuskan para wedana tidak menyembunyikan informasi dari patih memperlihatkan pentingnya komunikasi dalam struktur pemerintahan. Keterbukaan informasi memungkinkan pejabat mengetahui keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam hubungan birokrasi yang hierarkis, kejujuran dan keterbukaan juga berperan dalam menjaga koordinasi antara pejabat. Meskipun ketentuan tersebut terutama menekankan kewajiban bawahan kepada atasan, pesan yang dapat dibaca dari ketentuan itu adalah bahwa informasi memiliki kedudukan penting dalam menjaga keteraturan administrasi pemerintahan (Sarafuddin, 2016; Anggie et al., 2019).

Nilai keempat adalah religiusitas dan tanggung jawab spiritual. Penggalan teks yang berisi permohonan kepada Tuhan agar seorang pejabat ditunjukkan jalan yang benar memperlihatkan bahwa pelaksanaan jabatan dihubungkan dengan kesadaran religius. Pesan tersebut menempatkan perilaku seorang pemimpin dalam kerangka tanggung jawab moral yang lebih luas daripada kepatuhan administratif. Seorang pejabat diharapkan mempertimbangkan nilai kebaikan dan kebenaran ketika menjalankan kewenangannya. Dalam pembahasan mengenai etika dan spiritualitas Jawa, dimensi religius dapat menjadi salah satu unsur yang membentuk pandangan masyarakat tentang perilaku yang patut dan tanggung jawab seorang pemimpin (Mulder, 2001; Magnis-Suseno, 1997).

Nilai kelima adalah loyalitas dan keteraturan hubungan sosial. Kewajiban para pejabat bawahan untuk menaati patih memperlihatkan pentingnya kepatuhan dalam menjaga keberlangsungan struktur pemerintahan. Dalam sistem birokrasi, pembagian tugas dan penghormatan terhadap kewenangan dapat membantu koordinasi pekerjaan. Akan tetapi, kepatuhan juga perlu dipahami sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang menentukan hubungan antara pejabat dengan kedudukan berbeda. Oleh karena itu, nilai loyalitas dalam naskah memiliki dua sisi, yaitu sebagai pedoman untuk menjaga keteraturan dan sebagai mekanisme yang mempertahankan hierarki pemerintahan (Anggie et al., 2019; Pratikno, 2005).

Nilai-nilai sosial tersebut menunjukkan bahwa naskah tidak hanya berbicara mengenai kedudukan formal seorang patih, tetapi juga menggambarkan perilaku yang diharapkan dari pemegang kewenangan. Tanggung jawab terhadap rakyat, keadilan, kejujuran, religiusitas, dan loyalitas merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membentuk gambaran ideal mengenai kepemimpinan. Namun, nilai-nilai tersebut merupakan pesan normatif yang terkandung dalam naskah dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pejabat pada masa itu selalu menjalankannya dalam praktik. Pembacaan yang membedakan antara nilai ideal dalam teks dan kondisi historis pemerintahan diperlukan agar interpretasi tidak melampaui informasi yang tersedia dalam sumber (Magnis-Suseno, 1997; Mulder, 2001; Ricklefs, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran: Naskah Serat Sumpahipun Abdi Dalem Patih ing Karaton Surakarta merupakan sumber sejarah yang memberikan gambaran mengenai struktur pemerintahan, hubungan kekuasaan, dan etika kepemimpinan di Kasunanan Surakarta pada abad ke-19. Pengangkatan Raden Adipati Sasradiningrat sebagai patih pada 11 Februari 1847 memperlihatkan bahwa jabatan patih tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan politik. Pesan dalam naskah menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, serta perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Dari perspektif politik, kedudukan patih menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara Susuhunan Pakubuwono VII dan pemerintah kolonial Belanda. Patih berada pada posisi strategis yang menghubungkan otoritas tradisional keraton dengan kepentingan

Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa
Vol 14 No 2 Tahun 2026
Online ISSN: 2988-6309

administrasi kolonial. Penggunaan tata bahasa dan tradisi setempat dalam prosesi pengangkatan juga dapat dibaca sebagai bagian dari hubungan antara kekuasaan kolonial dan legitimasi politik keraton. Meskipun demikian, penafsiran mengenai dominasi kolonial perlu ditempatkan dalam konteks historis dan didukung oleh perbandingan dengan sumber lain agar tidak hanya bertumpu pada satu naskah. Selain nilai politik, naskah tersebut memuat nilai sosial berupa pengabdian kepada masyarakat, keadilan, kejujuran, religiusitas, dan ketaatan terhadap tanggung jawab jabatan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam teks tidak semata-mata diukur berdasarkan kedudukan, tetapi juga berdasarkan perilaku dan kewajiban seorang pemimpin terhadap masyarakat. Dengan demikian, naskah ini penting dikaji sebagai sumber sejarah dan budaya untuk memahami hubungan antara sumpah jabatan, legitimasi kekuasaan, dan etika kepemimpinan dalam tradisi pemerintahan Jawa.

BIBLIOGRAPHIE

Adab, F Akultas, and D A N Humaniora. “Peran Paku Buwono X Dalam Membendung Kristenisasi Di Surakarta (1893_1983)” (1939).

Anggie, Muhammad, Farizqi Prasadana, Hendri Gunawan, Balai Pelestarian, Nilai Budaya, and Sulawesi Utara. “KERUNTUHAN BIROKRASI TRADISIONALDI KASUNANAN SURAKARTA.” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 02 (2019).

“THE FALL OF TRADITIONAL BUREAUCRACY OF KASUNANAN SURAKARTA” (2019).

Dari, Perlawanan, and Dalam Kraton. “perlawanan Dari Dalam Kraton” (1871): 982–1000.

Magnis-Suseno, F. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Mulder, N. *Mistisisme Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nawawi, Imam. “Perlawanan Elite Kolonial Keraton Dan Elite Keagmaan Terhadap Kolonial Di Surakarta Pada Abad 19” (2023).

Pratikno, H. H. *Sifat, Nilai Dan Norma Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia since c.1200 (Edisi Modern)*. Stanford U., 2008.

Sarafuddin. “PEMANFAATAN PENINGGALAN SEJARAH KRATON SURAKARTA SEBAGAI MATERI PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN IPS SEKOLAH DASAR.” *Widya Wacana Vol. 11 Nomor 2* 11 (2016).

Sukrismiyati, Tri Yuniyanto, Djono. “STRATEGI POLITIK PAKUBUWANA VI MELAWAN KOLONIAL BELANDA TAHUN 1823 – 1830.” *Jurnal CANDI Vol. 12. No 2, Oktober 2015* 12, no. 2 (2015): 132–152.

Widodo, Widodo, and Universitas Indonesia. “Cultural Politics of Javanese Authority in the 19 Th Century” 7, no. December (2022).